

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat tersusun. Dokumen ini merupakan revisi dari Rencana Kerja sebelumnya yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan dinamika serta kebutuhan prioritas yang berkembang dalam kurun waktu berjalan.

Perubahan Renja ini menjadi penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup senantiasa relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan serta peluang yang ada di sektor pertanahan dan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Beberapa penyesuaian yang dilakukan mencakup:

1. **Penyesuaian Prioritas Pembangunan:** Mengakomodasi arahan kebijakan terbaru dari pemerintah daerah dan pusat terkait isu-isu strategis di bidang pertanahan, tata ruang, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam.
2. **Optimalisasi Alokasi Sumber Daya:** Melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran dan sumber daya lainnya agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. **Penyelarasan dengan Isu Global dan Lokal:** Memasukkan pertimbangan terkait perubahan iklim, penurunan kualitas lingkungan, serta isu-isu strategis lokal lainnya yang memerlukan respons cepat dan terukur.
4. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** Memperkuat fokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pertanahan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kami menyadari bahwa penyusunan perubahan Renja ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, unit kerja terkait, serta berbagai pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi berharga.

Kami berharap dokumen perubahan Renja ini dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi seluruh jajaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan akuntabel. Semoga upaya kita bersama dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan pengelolaan pertanahan yang adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Balangan, Juni 2025  
Kepala Dinas Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup  
  
Aidinnor. S. S. MM  
NIP. 967061133509 1 001

# **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan
4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024**

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

**BAB. IV PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja Dinas. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu pada isu-isu strategis di sektor pertanahan dan lingkungan hidup.

Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika yang sangat pesat, baik di tingkat nasional maupun lokal, diperlukan adanya penyesuaian terhadap Renja yang telah ada. Beberapa faktor mendasari kebutuhan akan perubahan Renja Tahun 2025 ini, antara lain:

#### 1. Perubahan Kebijakan dan Regulasi

Adanya perubahan kebijakan dan regulasi baru dari pemerintah pusat maupun daerah di bidang pertanahan dan lingkungan hidup, seperti undang-undang terkait tata ruang, perizinan berusaha berbasis risiko, atau peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menuntut Dinas untuk segera menyesuaikan program dan kegiatannya. Perubahan ini dapat mempengaruhi target, indikator kinerja, serta pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan.

#### 2. Evaluasi Kinerja dan Capaian Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi kinerja dan capaian program/kegiatan tahun sebelumnya menunjukkan adanya beberapa indikator yang belum tercapai secara optimal, atau sebaliknya, terdapat capaian yang melampaui target sehingga memerlukan penyesuaian strategi di tahun berikutnya. Pembelajaran dari pelaksanaan Renja sebelumnya menjadi dasar penting untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas di masa mendatang.

### 3. Perkembangan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Munculnya isu-isu strategis baru yang mendesak dan menjadi prioritas nasional maupun daerah, seperti percepatan reforma agraria, penanganan dampak perubahan iklim, pengelolaan sampah terpadu, penataan ruang yang berkelanjutan, serta upaya mitigasi dan adaptasi bencana berbasis lingkungan. Isu-isu ini menuntut respons cepat dan terencana dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

### 4. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya

Adanya keterbatasan atau penyesuaian alokasi anggaran serta sumber daya lainnya yang tersedia menuntut Dinas untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi dalam perencanaan program dan kegiatan. Penyesuaian ini bertujuan agar program yang dilaksanakan tetap berdaya guna dan berhasil guna dengan sumber daya yang ada.

### 5. Partisipasi Publik dan Kebutuhan Masyarakat

Masukan dari partisipasi publik serta hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait layanan pertanahan dan isu lingkungan hidup juga menjadi pertimbangan penting. Penyesuaian Renja ini diharapkan dapat lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 menjadi suatu keniscayaan. Dokumen perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan di sektor pertanahan dan lingkungan hidup.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708-Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

### C. Tujuan

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan dinamika pembangunan, kebutuhan aktual, serta regulasi terbaru di sektor pertanahan dan lingkungan hidup. Secara lebih rinci, tujuan dari perubahan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Program dengan Kebijakan Terbaru: Memastikan seluruh program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2025 selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah yang terbaru, termasuk perubahan regulasi terkait tata ruang, agraria, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini penting agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan strategis yang berlaku.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja: Melakukan optimalisasi alokasi sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana prasarana) agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Dinas.

3. Merumuskan Prioritas yang Lebih Relevan: Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang lebih relevan dan responsif terhadap isu-isu strategis terkini di bidang pertanahan dan lingkungan hidup, seperti penanganan dampak perubahan iklim, pengelolaan limbah, penataan ruang berkelanjutan, serta percepatan penyelesaian konflik pertanahan. Ini memastikan Dinas fokus pada masalah yang paling mendesak.
4. Memperkuat Akuntabilitas Perencanaan: Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih akuntabel dan terukur, dengan indikator kinerja yang jelas dan realistis, sehingga memudahkan dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian program. Dengan begitu, kinerja Dinas dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pengelolaan pertanahan yang adil dan berpihak pada rakyat, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang optimal. Ini merupakan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam.

## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Selain itu bab ini juga memuat analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN**

Pada bab ini berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja SKPD; Program dan Kegiatan.

### **BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD**

Pada bab ini menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai SKPD dikaitkan dengan target renstra periode berjalan.

### **BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Pada bab ini berisi dana indikatif tahun berjalan dan prakiraan maju.

### **BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan di SKPD pada tahun berjalan.

### **BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II**

Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2025 sampai triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2025 pada Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar Rp. 44.841.273.570,00
2. Realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar Rp. 10.629.363.945,-

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada APBD yang telah dilakukan sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2025 yang dievaluasi	
					I		II		III		IV			
1	3	4	7		8		9		10		11		12	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>74 Point</b>	<b>17.228.812.830</b>	<b>72.75 Point</b>	<b>2.840.998.005</b>	<b>72.75 Point</b>	<b>5.980.932.362</b>					<b>72.75 Point</b>	<b>5.980.932.362</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	101.119.000	25 Persen	12.000.000	50 Persen	26.400.000					50 Persen	26.400.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	58.379.000	0 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	24.000.000					1 Dokumen	24.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	42.740.000	0 Laporan	0	1 Laporan	2.400.000					1 Laporan	2.400.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	10.423.805.920	25 Persen	2.543.289.136	50 Persen	5.156.182.615					50 Persen	5.156.182.615
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	10.339.365.920	46 Orang/bulan	2.533.089.136	46 Orang/bulan	5.139.182.615					46 Orang/bulan	5.139.182.615
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	41.440.000	0 Laporan	5.100.000	0 Laporan	10.200.000					0 Laporan	10.200.000

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	43.000.000	1 Laporan	5.100.000	1 Laporan	6.800.000					1 Laporan	6.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	47.590.000	0 Persen	0	0 Persen	0					0 Persen	0
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	27.590.000	0 Paket	0	0 Paket	0					0 Paket	0
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	20.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.884.388.900	25 Persen	197.578.085	50 Persen	414.822.027					50 Persen	414.822.027
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	46.537.500	0 Paket	0	1 Paket	10.515.000					1 Paket	10.515.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	806.331.800	0 Paket	0	0 Paket	0					0 Paket	0
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.849.600	0 Paket	0	0 Paket	9.234.000					0 Paket	9.234.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.560.000	0 Dokumen	3.600.000	0 Dokumen	4.100.000					0 Dokumen	4.100.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665 Laporan	997.110.000	85 Laporan	193.978.085	185 Laporan	390.973.027					185 Laporan	390.973.027
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	1.722.140.400	0 Persen	0	0 Persen	0					0 Persen	0

13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	651.964.000	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.070.176.400	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen	1.753.157.460	25 Persen	62.515.784	50 Persen	278.733.720					50 Persen	278.733.720
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.700.000	1 Laporan	3.900.000	4 Laporan	8.915.000					4 Laporan	8.915.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	339.231.000	1 Laporan	26.715.784	4 Laporan	57.345.720					4 Laporan	57.345.720
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.998.400	0 Laporan	0	3 Laporan	6.600.000					3 Laporan	6.600.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.329.228.060	1 Laporan	31.900.000	4 Laporan	205.873.000					4 Laporan	205.873.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.296.611.150	25 Persen	25.615.000	50 Persen	104.794.000					50 Persen	104.794.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	323.613.000	1 Unit	10.615.000	3 Unit	74.794.000					3 Unit	74.794.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	972.998.150	0 Unit	15.000.000	1 Unit	30.000.000					1 Unit	30.000.000

2	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	100 Persen	157.190.600	0 Persen	0	25 Persen	0					25 Persen	0
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	157.190.600	0 Persen	0	25 Persen	0					25 Persen	0
22	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	157.190.600	0 Laporan	0	0 Laporan	0					0 Laporan	0
3	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	100 Persen	10.000.300	0 Persen	0	25 Persen	0					25 Persen	0
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	10.000.300	0 Persen	0	25 Persen	0					25 Persen	0
23	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	10.000.300	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	100 Persen	752.450.600	25 Persen	30.450.000	50 Persen	66.113.500					50 Persen	66.113.500
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	100 Persen	752.450.600	25 Persen	30.450.000	50 Persen	66.113.500					50 Persen	66.113.500
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	752.450.600	0 Dokumen	30.450.000	0 Dokumen	66.113.500					0 Dokumen	66.113.500
5	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah</b>	100 Persen	545.299.700	25 Persen	14.575.000	50 Persen	35.025.000					50 Persen	35.025.000

	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	545.299.700	25 Persen	14.575.000	50 Persen	35.025.000					50 Persen	35.025.000
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	545.299.700	0 Laporan	14.575.000	1 Laporan	35.025.000					1 Laporan	35.025.000
<b>6</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.425.803.100</b>	<b>25 Persen</b>	<b>4.107.000</b>	<b>50 Persen</b>	<b>44.698.500</b>					<b>50 Persen</b>	<b>44.698.500</b>
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	100 Persen	1.152.745.300	0 Persen	0	25 Persen	6.991.500					25 Persen	6.991.500
26	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160.011.200	0 Dokumen	0	0 Dokumen	6.991.500					0 Dokumen	6.991.500
27	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	992.734.100	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 Persen	273.057.800	25 Persen	4.107.000	50 Persen	37.707.000					50 Persen	37.707.000
28	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	109.857.800	0 Dokumen	4.107.000	0 Dokumen	37.707.000					0 Dokumen	37.707.000
29	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	163.200.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.937.768.500</b>	<b>25 Persen</b>	<b>85.580.000</b>	<b>50 Persen</b>	<b>342.579.500</b>					<b>50 Persen</b>	<b>342.579.500</b>
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	100 Persen	1.863.046.000	25 Persen	85.580.000	50 Persen	342.579.500					50 Persen	342.579.500

30	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	89.500.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	69.424.500					0 Dokumen	69.424.500
31	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	8 Lokasi	133.000.000	2 Lokasi	5.940.000	8 Lokasi	26.586.000					8 Lokasi	26.586.000
32	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	315.368.700	0 Laporan	6.590.000	0 Laporan	52.310.000					0 Laporan	52.310.000
33	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	70.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	65.019.000					0 Dokumen	65.019.000
34	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1.255.177.300	0 Dokumen	73.050.000	0 Dokumen	129.240.000					0 Dokumen	129.240.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	74.722.500	0 Persen	0	0 Persen	0					0 Persen	0
35	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 Kegiatan	74.722.500	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0					0 Kegiatan	0
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase Peningkatan Keaneekaragaman Hayati</b>	<b>100 Persen</b>	<b>12.720.771.500</b>	<b>25 Persen</b>	<b>569.675.128</b>	<b>50 Persen</b>	<b>1.038.055.388</b>					<b>50 Persen</b>	<b>1.038.055.388</b>
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 Persen	12.720.771.500	25 Persen	569.675.128	50 Persen	1.038.055.388					50 Persen	1.038.055.388
36	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8.4 Ha	3.166.611.300	2.1 Ha	84.133.580	8.4 Ha	198.405.975					8.4 Ha	198.405.975
37	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	112.221 Ha	9.554.160.200	28.06 Ha	485.541.548	112.221 Ha	839.649.413					112.221 Ha	839.649.413

9	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3</b>	<b>100 Persen</b>	<b>40.100.000</b>	<b>25 Persen</b>	<b>685.000</b>	<b>50 Persen</b>	<b>1.985.000</b>					<b>50 Persen</b>	<b>1.985.000</b>
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	100 Persen	40.100.000	25 Persen	685.000	50 Persen	1.985.000					50 Persen	1.985.000
38	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	40.100.000	0 Laporan	685.000	1 Laporan	1.985.000					1 Laporan	1.985.000
10	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>299.115.170</b>	<b>25 Persen</b>	<b>4.500.000</b>	<b>50 Persen</b>	<b>43.955.500</b>					<b>50 Persen</b>	<b>43.955.500</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	100 Persen	299.115.170	25 Persen	4.500.000	50 Persen	43.955.500					50 Persen	43.955.500
39	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	87.690.200	0 Dokumen	0	0 Dokumen	16.717.000					0 Dokumen	16.717.000
40	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	7 Badan Usaha	211.424.970	1 Badan Usaha	4.500.000	3 Badan Usaha	27.238.500					3 Badan Usaha	27.238.500

11	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100 Persen	22.502.400	0 Persen	0	50 Persen	933.000					50 Persen	933.000
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan	100 Persen	22.502.400	0 Persen	0	50 Persen	933.000					50 Persen	933.000
41	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	22.502.400	0 Dokumen	0	0 Dokumen	933.000					0 Dokumen	933.000
12	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	100 Persen	87.178.800	25 Persen	7.570.000	50 Persen	23.000.000					50 Persen	23.000.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	100 Persen	87.178.800	25 Persen	7.570.000	50 Persen	23.000.000					50 Persen	23.000.000
42	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	87.178.800	1 Entitas	7.570.000	1 Entitas	23.000.000					1 Entitas	23.000.000
13	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	100 Persen	55.348.800	25 Persen	7.500.000	50 Persen	25.709.000					50 Persen	25.709.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 Persen	55.348.800	25 Persen	7.500.000	50 Persen	25.709.000					50 Persen	25.709.000

43	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3 Pengaduan	55.348.800	1 Pengaduan	7.500.000	1 Pengaduan	25.709.000					1 Pengaduan	25.709.000
14	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah</b>	<b>99 Persen</b>	<b>10.446.837.730</b>	<b>25 Persen</b>	<b>1.464.644.070</b>	<b>50 Persen</b>	<b>3.026.377.195</b>					<b>50 Persen</b>	<b>3.026.377.195</b>
	Pengelolaan Sampah	Persentase Wilayah yang Bersih	100 Persen	10.446.837.730	25 Persen	1.464.644.070	50 Persen	3.026.377.195					50 Persen	3.026.377.195
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	1.931.925.130	0 Unit	0	0 Unit	5.880.000					0 Unit	5.880.000
45	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3300 Ton	1.398.883.700	825 Ton	159.605.070	1650 Ton	285.269.670					1650 Ton	285.269.670
46	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1500 Ton	7.116.028.900	375 Ton	1.305.039.000	750 Ton	2.735.227.525					750 Ton	2.735.227.525
Jumlah Anggaran dari seluruh Program				45.729.180.030		5.030.284.203		10.629.363.945						10.629.363.945

Sumber : e monev Bapperida triwulan 2

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2024	
1	Indeks Kualitas Air	-	50,40	50,40	53,33	
2	Indeks Kualitas Udara	-	91,27	91,27	97,23	
3	Indeks Kualitas Lahan	-	57,36	57,36	51,9	
4	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	-	100	100	98,82	

### Permasalahan/Hambatan

Beberapa permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan antara lain:

1. Peningkatan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan.
2. Belum adanya masterplan pengendalian dan pencemaran sungai.
3. Penggunaan sumberdaya alternatif yang kurang optimal.
4. Belum optimalnya pengkajian dan pemanfaatan teknologi terhadap pengolahan air.

### Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Diperlukan tambahan tenaga teknis untuk pemantauan kualitas air, udara dan tenaga penganalisis data lingkungan;
2. Melakukan koordinasi tentang instrumen tata cara pengawasan sesuai dengan perundang-undangan;
3. Melakukan pengawasan bersama pengendalian pencemaran;
4. Sosialisasi peraturan perundangan tentang kewajiban dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;

### **2.3 Analisis Sosial Ekonomi SKPD.**

Analisis sosial ekonomi adalah alat penting bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk memahami bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan mereka memengaruhi masyarakat dan perekonomian, serta bagaimana faktor sosial dan ekonomi memengaruhi keberhasilan program dinas. Ini bukan sekadar data statistik, melainkan sebuah cara pandang holistik untuk memastikan setiap keputusan yang diambil adil, efektif, dan berkelanjutan. Berikut adalah elemen kunci dari analisis sosial ekonomi yang relevan untuk Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup:

#### 1. Demografi dan Kependudukan

- Pola Sebaran dan Kepadatan Penduduk: Apakah ada daerah dengan kepadatan tinggi yang rentan terhadap masalah lingkungan (misalnya, timbunan sampah, pencemaran air) atau konflik lahan (misalnya, permukiman di atas lahan sengketa)
- Pertumbuhan Penduduk: Pertumbuhan populasi yang tinggi dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya alam (air, hutan, lahan pertanian) dan infrastruktur lingkungan. Ini memengaruhi perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
- Struktur Umur: Proporsi usia produktif, anak-anak, dan lansia dapat memengaruhi partisipasi dalam program, kebutuhan tenaga kerja, atau bahkan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam isu lingkungan (misalnya, balita rentan polusi).
- Migrasi (Urbanisasi/Ruralisasi): Arus urbanisasi dapat memperparah masalah permukiman kumuh, ketersediaan lahan, dan beban lingkungan perkotaan. Sebaliknya, ruralisasi atau kembali ke desa bisa menjadi peluang untuk pengembangan ekonomi berbasis lahan.

#### 2. Kondisi Ekonomi Masyarakat

- Mata Pencarian Utama: Apakah dominan sektor pertanian, perikanan, industri, atau jasa. Kebijakan pertanahan (misalnya, reforma agraria, pendaftaran tanah) dan

lingkungan (misalnya, perlindungan lahan pertanian, regulasi industri) akan memiliki dampak langsung pada sektor-sektor ini.

- **Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan:** Program dinas harus mempertimbangkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Misalnya, program sertifikasi tanah gratis dapat mengangkat ekonomi petani kecil, atau program sanitasi lingkungan dapat mengurangi biaya kesehatan.
- **Kepemilikan dan Akses Lahan:** Ini adalah inti tugas dinas pertanahan. Analisis ini melihat siapa yang memiliki akses dan kendali atas lahan, apakah ada ketimpangan, dan bagaimana legalisasi aset dapat meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
- **Potensi Ekonomi Berbasis Lingkungan:** Identifikasi potensi ekowisata, hasil hutan bukan kayu, atau pertanian berkelanjutan yang bisa dikembangkan dengan dukungan kebijakan perlindungan lingkungan.

### 3. Aspek Sosial dan Budaya

- **Kearifan Lokal:** Banyak komunitas memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan lingkungan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Menganalisis dan mengintegrasikan kearifan lokal dapat membuat program lebih relevan dan diterima masyarakat.
- **Partisipasi Masyarakat:** Tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang, pengelolaan limbah, atau penyelesaian sengketa lahan sangat penting. Analisis ini melihat siapa yang berpartisipasi dan bagaimana inklusivitas dapat ditingkatkan.
- **Potensi Konflik Sosial:** Kebijakan pertanahan dan lingkungan seringkali bersinggungan dengan kepentingan berbagai pihak. Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi konflik (misalnya, sengketa batas, dampak limbah pabrik, penggusuran) dan merumuskan strategi mitigasinya.
- **Akses Terhadap Sumber Daya:** Selain lahan, akses terhadap air bersih, udara bersih, dan lingkungan hidup yang sehat adalah hak dasar. Analisis ini mengevaluasi sejauh mana kelompok masyarakat tertentu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ini.

#### 4. Kebijakan dan Regulasi

- Analisis Dampak Kebijakan: Sebelum menerapkan kebijakan baru (misalnya, zonasi baru, peraturan limbah), perlu dinilai potensi dampaknya terhadap mata pencarian, harga tanah, atau kesehatan masyarakat.
- Sinkronisasi Lintas Sektor: Isu pertanahan dan lingkungan hidup tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pertanian, dan industri. Analisis ini melihat bagaimana program dinas dapat bersinergi dengan sektor lain untuk dampak sosial ekonomi yang lebih besar.

#### Manfaat Analisis Sosial Ekonomi bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup:

1. Perencanaan yang Lebih Tepat Sasaran: Program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi ekonomi setempat.
2. Peningkatan Keberlanjutan Program: Memastikan program tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
3. Pengurangan Risiko Konflik: Dengan memahami dinamika sosial dan ekonomi, potensi konflik dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal.
4. Peningkatan Akuntabilitas: Mengukur dampak program tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses sumber daya.
5. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti: Kebijakan didasarkan pada data dan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial ekonomi, bukan sekadar asumsi.

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025, program yang akan dilaksanakan sebanyak 13 program, Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 22 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Pendanaan yang direncanakan sebesar Rp. 44.538.996.964,- Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut berlokasi di lingkungan kantor, masyarakat, sekolah, sungai dan beberapa perusahaan wilayah Kab. Balangan.

Kode	Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025										
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>74 Point</b>	<b>74 Point</b>	<b>18.347.522.870</b>	<b>18.297.555.180</b>	<b>-49.967.690</b>	APBD	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	133.893.500	101.119.000	-32.774.500	APBD	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Dokumen	2 Dokumen	66.358.500	58.379.000	-7.979.500	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Laporan	4 Laporan	67.535.000	42.740.000	-24.795.000	APBD	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	9.971.727.760	10.423.805.920	452.078.160	APBD	APBD

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	9.874.847.760	10.339.365.920	464.518.160	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Laporan	1 Laporan	46.880.000	41.440.000	-5.440.000	APBD	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	43.000.000	-7.000.000	APBD	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	105.247.500	69.550.000	-35.697.500	APBD	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 Paket	55.247.500	39.550.000	-15.697.500	APBD	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Orang	6 Orang	50.000.000	30.000.000	-20.000.000	APBD	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	2.952.902.800	2.822.826.100	-130.076.700	APBD	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Paket	4 Paket	93.091.000	176.572.700	83.481.700	APBD	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	13 Paket	13 Paket	806.331.800	1.049.458.800	243.127.000	APBD	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Paket	1 Paket	49.700.000	24.849.600	-24.850.400	APBD	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.560.000	39.560.000	30.000.000	APBD	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	665 Laporan	469 Laporan	1.994.220.000	1.532.385.000	-461.835.000	APBD	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	1.935.246.400	2.624.452.400	689.206.000	APBD	APBD
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Kab. Balangan	-	Kab. Balangan	1 Unit	1 Unit	651.964.000	651.964.000	0	APBD	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kab. Balangan	-	Kab. Balangan	1 Unit	12 Unit	517.339.000	1.146.498.000	629159000	APBD	APBD
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Balangan	-	Kab. Balangan	4 Unit	3 Unit	765.943.400	825.990.400	60.047.000	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	1.924.455.760	937.860.410	-986.595.350	APBD	APBD

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Laporan	12 Laporan	36.200.000	33.700.000	-2.500.000	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Laporan	12 Laporan	339.231.000	245.868.900	-93.362.100	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Laporan	12 Laporan	50.998.400	50.998.400	0	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	12 Laporan	12 Laporan	1.498.026.360	607.293.110	-890.733.250	APBD	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	1.324.049.150	1.317.941.350	-6.107.800	APBD	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	10 Unit	10 Unit	347.299.000	344.943.200	-2.355.800	APBD	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Unit	1 Unit	976.750.150	972.998.150	-3.752.000	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.523.134.000</b>	<b>1.742.587.500</b>	<b>219.453.500</b>	APBD	APBD
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	1.234.576.200	736.921.700	-497.654.500	APBD	APBD
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	190.976.600	138.887.600	-52.089.000		APBD
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.043.599.600	598.034.100	-445.565.500		APBD
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	288.557.800	1.005.665.800	717.108.000	APBD	APBD
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	117.857.800	59.757.800	-58.100.000	APBD	APBD

	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	170.700.000	945.908.000	775.208.000		APBD
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.264.998.900</b>	<b>2.406.768.450</b>	<b>141.769.550</b>	APBD	APBD
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	2.164.998.900	1.832.045.950	-332.952.950	APBD	APBD
	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	89.500.000	-10.500.000	APBD	APBD
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8 Lokasi	8 Lokasi	145.000.000	102.000.000	-43.000.000	APBD	APBD
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Laporan	1 Laporan	449.999.600	315.368.700	-134.630.900	APBD	APBD
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	0	APBD	APBD
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.399.999.300	1.255.177.250	-144.822.050	APBD	APBD
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	100.000.000	574.722.500	474.722.500	APBD	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.000.000	574.722.500	474.722.500	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>10.195.934.500</b>	<b>11.958.360.200</b>	<b>1.762.425.700</b>	APBD	APBD

	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	10.195.934.500	11.958.360.200	1.762.425.700	APBD	APBD
	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	8.4 Ha	8.4 Ha	2.684.272.100	2.979.655.500	295.383.400	APBD	APBD
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	112.221 Ha	112.221 Ha	7.511.662.400	8.978.704.700	1.467.042.300	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3</b>	<b>Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40.100.000</b>	<b>-9.900.000</b>	APBD	APBD
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	40.100.000	-9.900.000	APBD	APBD
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	40.100.000	-9.900.000	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan</b>	<b>Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>500.000.000</b>	<b>299.115.170</b>	<b>-200.884.830</b>	APBD	APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Persentase Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	500.000.000	299.115.170	-200.884.830	APBD	APBD
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	87.690.200	-12.309.800	APBD	APBD
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	7 Badan Usaha	7 Badan Usaha	400.000.000	211.424.970	-188.575.030	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>49.999.300</b>	<b>22.502.400</b>	<b>-27.496.900</b>	APBD	APBD

	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan	Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	49.999.300	22.502.400	-27.496.900	APBD	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.300	22.502.400	-27.496.900	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>109.940.900</b>	<b>87.178.500</b>	<b>-22.762.400</b>	APBD	APBD
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	Persentase Penerimaan Penghargaan Lingkungan hidup	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	109.940.900	87.178.500	-22.762.400	APBD	APBD
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Entitas	3 Entitas	109.940.900	87.178.500	-22.762.400	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>75.000.000</b>	<b>55.348.800</b>	<b>-19.651.200</b>	APBD	APBD
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	75.000.000	55.348.800	-19.651.200	APBD	APBD
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3 Pengaduan	3 Pengaduan	75.000.000	55.348.800	-19.651.200	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah</b>	<b>Persentase pengelolaan sampah</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>99 Persen</b>	<b>99 Persen</b>	<b>9.964.743.600</b>	<b>10.607.448.530</b>	<b>642.704.930</b>	APBD	APBD
	Pengelolaan Sampah	Persentase Wilayah yang Bersih	Persentase Wilayah yang Bersih	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	9.964.743.600	10.607.448.530	642.704.930	APBD	APBD

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	5 Unit	6 Unit	1.067.178.000	2.081.866.330	1.014.688.330	APBD	APBD
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	3300 Ton	3300 Ton	1.499.701.000	1.336.519.300	-163.181.700	APBD	APBD
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1500 Ton	1500 Ton	7.397.864.600	7.189.062.900	-208.801.700	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	178.000.000	157.190.600	-20.809.400	APBD	APBD
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	178.000.000	157.190.600	-20.809.400	APBD	APBD
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Laporan	2 Laporan	178.000.000	157.190.600	-20.809.400	APBD	APBD
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	<b>Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	20.000.000	10.000.300	-9.999.700	APBD	APBD
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	20.000.000	10.000.300	-9.999.700	APBD	APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	10.000.300	-9.999.700	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	776.000.000	523.944.700	-252.055.300	APBD	APBD
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	776.000.000	523.944.700	-252.055.300	APBD	APBD

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	1 Dokumen	1 Dokumen	776.000.000	523.944.700	-252.055.300	APBD	APBD
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah</b>	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>785.999.500</b>	<b>719.079.700</b>	<b>-66.919.800</b>	APBD	APBD
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	100 Persen	100 Persen	785.999.500	719.079.700	-66.919.800	APBD	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Kab. Balangan	2 Laporan	2 Laporan	785.999.500	719.079.700	-66.919.800	APBD	APBD

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Demikianlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, serta kebutuhan prioritas di sektor pertanahan dan lingkungan hidup. Dokumen ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam terhadap capaian sebelumnya, identifikasi isu-isu strategis terkini, serta proyeksi kebutuhan di masa mendatang.

Kami berharap perubahan Renja ini dapat menjadi panduan yang komprehensif dan akuntabel bagi seluruh jajaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan perencanaan yang lebih terarah, efisien, dan partisipatif, kami optimis dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan implementasi Renja ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh unit kerja internal Dinas, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Semoga dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi, kita dapat mewujudkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta terpeliharanya fungsi lingkungan hidup yang lestari demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan ekosistem

Balangan, Juni 2025  
Kepala Dinas Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup



Aidinno, S.Sos, MM  
NIP. 198708171985091001